

ABSTRAK

Penelitian ini membahas “Konstruksi Agama Leluhur Pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat Perspektif Keadilan Bermartabat”. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-empiris dan analisis kritis untuk menjawab dua rumusan masalah utama: memecahkan persoalan hukum terkait dengan pengakuan dan konstruksi agama leluhur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak masyarakat adat dan melakukan pengembangan terkait dengan formulasi peraturan perundang-undangan yang tepat bagi pengakuan dan perlindungan agama leluhur yang telah berakar bersama-sama dengan masyarakat hukum adat. Perbedaan antara hukum nasional, agama resmi, dan praktik keagamaan masyarakat adat sering kali menyebabkan marginalisasi dan diskriminasi. Pengakuan hak atas spiritualitas dan kebudayaan dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, meskipun mencakup hak untuk menjalankan upacara dan ritual leluhur, tidak secara eksplisit mengakui agama leluhur sebagai bagian dari hak spiritualitas. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pemahaman hak atas spiritualitas dan kebudayaan dalam konteks agama leluhur masyarakat adat, serta menilai bagaimana kebijakan yang diusulkan dapat lebih mencerminkan keadilan bermartabat.

Referensi : 75 (1800 - 2024)

Kata kunci : Agama Leluhur, Keadilan Bermartabat, Masyarakat Hukum Adat, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat

ABSTRACT

This research discusses "The Construction of Ancestral Religion in the Academic Text of the Draft Law on Indigenous Peoples from a Dignified Justice Perspective". This research was conducted using juridical-empirical methods and critical analysis to answer two main problem formulations: solving legal problems related to the recognition and construction of ancestral religion as an inseparable part of the rights of indigenous peoples and carrying out developments related to the formulation of appropriate legislative regulations for recognition and protection of ancestral religions that have taken root together with customary law communities. Differences between national laws, official religions, and indigenous peoples' religious practices often lead to marginalization and discrimination. The recognition of the right to spirituality and culture in the Draft Law on Indigenous Peoples, although it includes the right to carry out ancestral ceremonies and rituals, does not explicitly recognize ancestral religion as part of the right to spirituality. This research aims to reconstruct the understanding of the right to spirituality and culture in the context of the ancestral religion of indigenous peoples, as well as assessing how proposed policies can better reflect dignified justice.

References : 75 (1800 - 2024)

Kata kunci : *Ancestral Religion, Dignified Justice, Indigenous People, Draft Law*